

**ANALISIS SOSIAL DAN KELEMBAGAAN DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI
BATUKLIANG UTARA – LOMBOK TENGAH**
*Social and Institutional Analysis of Community Forest
Management in North Batukliang – Central Lombok*

Muktasam

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNRAM

ABSTRAK

Membangun dan melestarikan hutan menjadi isu yang semakin kompleks dalam satu dekade terakhir. Di satu sisi hutan diharapkan mampu untuk mempertahankan fungsi ekologisnya, sementara di sisi lain hutan diharapkan berperan banyak dalam memenuhi fungsi sosial dan ekonomi. Atas dasar persoalan ini, sebuah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa aspek sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode “*Modified Participatory Action Research*” ini menemukan adanya beberapa persoalan strategis dalam aspek sosial dan kelembagaan yang terkait dengan interaksi *manusia* dengan *hutan*. Dalam aspek sosial diidentifikasi tingginya tingkat ketegantungan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan, yang kemudian mendorong mereka untuk masuk mengelola dan atau merusak hutan. Dalam aspek kelembagaan diketahui bahwa masyarakat di sekitar kawasan telah memiliki “lembaga” yang diharapkan berperan dalam pengelolaan hutan, namun hingga penelitian ini dilakukan kelembagaan yang ada belum mampu berperan sebagaimana mestinya.

ABSTRACT

Developing and sustaining forest becomes complex issues in the last one decade. In one hand, forest development is directed to improve its ecological functions while on the other hand forestry development is supposed to fulfil its socio-economic functions. On the basis of these expectations, this study was carried out to analyse socio-institutional aspects of forest management. Through the application of the “Modified Participatory Action Research” method, this study found some critical and strategic issues associated social and institutional aspects of forest management. In social aspect for instance, it was found that the surrounding community has high dependency toward forest that lead to their actions in managing and or destroying the forest. From institutional point of view, it was found that the community has had some forms of institutional arrangement, however they could not be implemented effectively.

Kata Kunci: Kelembagaan, masyarakat, pengelolaan, hutan

Key Words: *Institutions, community, forest, management*

PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan secara umum ditujukan untuk memenuhi dua fungsi, yaitu (1) fungsi ekologis dan (2) fungsi sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai fungsi ekologis, pembangunan kehutanan meliputi antara lain bagaimana mempertahankan hutan sebagai penangkap dan pengatur air, penghasil oksigen, menjaga keseimbangan iklim mikro dan makro, mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dalam hal fungsi sosial, ekonomi dan budaya, pembangunan kehutanan ditujukan untuk memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan melalui produk-produk kehutanan seperti kayu dan non-kayu, jasa lingkungan, pariwisata, lapangan kerja dan lainnya. Idealnya, kedua fungsi ini berjalan seimbang dan berkelanjutan. Kegagalan dalam mencapai keseimbangan itulah yang kemudian menimbulkan sejumlah masalah, antara lain pembabatan hutan yang tidak terkendali sebagai akibat dari tekanan ekonomi, perubahan persepsi sosial terhadap hutan dan terbatasnya suply lahan untuk kegiatan pertanian dan industri.

Lombok tengah dengan areal hutan seluas 37.681,3 ha, yang terdiri dari hutan lindung, produksi, suaka alam dan hutan rakyat (Dinas Kehutanan Lombok Tengah, 2003) juga berhadapan dengan tantangan untuk mempertahankan kedua fungsi pembangunan kehutanan tersebut - fungsi ekologis dan fungsi sosial, ekonomi dan budaya. Di satu sisi fungsi ekologis harus dapat dipertahankan dan di sisi lain juga memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan untuk mencapai kedua fungsi ini adalah adanya program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dimulai sejak tahun 1998 dengan dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 667/kpts-II/1988, dan juga ijin sementara Hutan Kemasyarakatan berdasarkan SK Kakanwil Dephutbun propinsi NTB Nomor: 06/kpts/kwi-4/2000.

Penelitian telah dilakukan dengan tujuan mengkaji aspek sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di kecamatan Batukliang Utara – Lombok Tengah (Muktasam, et.al., 2003). Hal ini penting guna membangun pemahaman tentang berbagai isu dan masalah sosial serta kelembagaan yang melingkupi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemahaman yang baik tentang persoalan sosial dan kelembagaan ini pada gilirannya bermanfaat dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan kehutanan secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam tulisan ini diarahkan untuk mengkaji aspek *sosial kelembagaan* dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan kemasyarakatan Batukliang Utara – Lombok

Tengah. Kajian aspek sosial dalam penelitian ini mengacu pada sikap dan persepsi sosial, interaksi masyarakat dengan hutan, dan perilaku lainnya yang kemudian berkaitan dengan hutan. Hal ini mencakup misalnya masalah sosial yang dihadapi, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap hutan, kekompakan masyarakat dalam menjaga hutan, persepsi terhadap agroforestri, dan persepsi masyarakat terhadap peran yang seharusnya dimainkan oleh stakeholders.

Sedangkan kajian aspek kelembagaan dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada “kelembagaan sebagai wadah”, baik di tingkat masyarakat (community institutions) maupun di tingkat aparat (government institutions). Hal ini mencakup misalnya keberadaan “kelompok”, “assosiasi”, “gabungan kelompok”, “koperasi”, “forum” dan sebagainya. Sedangkan “kelembagaan” dalam perspektif “aturan” atau “norma” (yang menjadi acuan berperilaku bagi masyarakat dan aparat), penelitian ini mengacu pada “aturan-aturan” yang ada di tingkat kelompok, desa, dan aturan lainnya yang lebih tinggi seperti peraturan daerah atau perda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tiga desa yang masyarakatnya terlibat dan mendapat hak kelola pada program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Batukliang Utara – Lombok Tengah. Ketiga desa tersebut adalah Aik Berik, Setiling dan Lantan.

Penelitian ini menggunakan metode “*Modified Participatory Action Research - MPAR*” atau “*Kaji-tindak Partisipatif Termodifikasi*” sebagai pendekatan dalam *proses pengumpulan data, pembelajaran, dan pengembangan partisipasi*. Metode ini menggabungkan **survey** dan **workshop** sebagai pendekatan dalam pengumpulan data, proses pembelajaran, dan penyusunan rencana aksi (Muktasam, 2000).

Survey dilakukan untuk mengumpulkan data kawasan dan masyarakat sekitar kawasan, yang meliputi **data bio-fisik** (seperti iklim, tanah, sistem usahatani, pola-pola agroforestri dan pola penggunaan lahan lainnya) dan **data sosial-ekonomi dan kelembagaan** (seperti jumlah penduduk yang bermukim di sekitar kawasan, jenis pekerjaan atau sumber pendapatan, interaksi penduduk dengan hutan, pendapatan atau tingkat ekonomi, konflik sosial, dan kelembagaan).

Data bersumber dari semua stakeholders, yang terdiri atas masyarakat atau petani sekitar kawasan hutan, petugas lapangan dan staf lain dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Wawancara dengan petani atau masyarakat dilakukan dengan menggunakan kuisisioner sedangkan

wawancara dengan petugas atau aparat dari Dinas atau Lembaga terkait lainnya dilakukan dengan menggunakan “pedoman wawancara”.

Hasil survey dan wawancara mendalam kemudian dirumuskan sebagai kesimpulan sementara hasil penelitian, yang kemudian dipresentasikan dan diverifikasi dalam rangkaian *workshops* di tingkat kawasan, kabupaten dan propinsi. *Tujuan dari pelaksanaan masing-masing workshop, dan workshop* bertingkat ini adalah:

1. Sebagai proses *verifikasi dan memperkaya* temuan penelitian atau hasil survey (kesimpulan sementara).
2. Untuk memfasilitasi proses belajar masyarakat dan organisasi - *community and organisational learning* - melalui identifikasi masalah-masalah pengelolaan hutan, faktor penyebab, dan solusi.
3. Memfasilitasi masyarakat dan stakeholders lainnya dalam mengembangkan *rencana aksi*.
4. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan yang menyangkut masalah, penyebab, solusi dan rencana aksi. Hal ini pada gilirannya dapat memunculkan rasa memiliki atas program pembangunan pada diri stakeholders, yang juga akan melahirkan komitmen dan tanggung jawab dalam implementasi rencana aksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Sosial dalam Pengelolaan Hutan di Lombok Tengah

Masalah sosial

Hasil wawancara maupun workshop menunjukkan adanya tiga masalah sosial penting yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan ini. Ketiga masalah sosial tersebut adalah *kemiskinan, pengangguran, dan pencurian kayu hutan*. Dari 25 responden yang diwawancarai pada ketiga desa penelitian (Aik Berik, Setiling dan Lantan), sejumlah 24 orang (hampir 100 %) responden menyatakan kemiskinan sebagai masalah pokok. Kemiskinan dan ketiadaan lapangan kerja ternyata telah menyebabkan terjadinya pencurian kayu pada kawasan hutan secara terus menerus. Hal ini konsisten dengan hasil proses belajar yang difasilitasi melalui workshop, yang juga menunjukkan masalah sosial yang sama (lihat Tabel 1 hasil workshop - masalah sosial, kelembagaan dan ekonomi, yaitu masalah no. 8, 11, 12, dan 14).

Tabel 1. Masalah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dalam Perspektif Masyarakat

Aspek	Hasil Worskhop
Bio-fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesuburan lahan berkurang 2. Bibit tanaman tidak cocok/daya tumbuh rendah 3. Pola tanam tidak optimal/monoton 4. Hama tikus sering menyebabkan kerugian (sebelum dan setelah panen) 5. Jarak antara rumah dengan lahan yang relatif jauh 6. Tidak tersedia transportasi dari desa ke kawasan HKm (Lantan, \pm 15 km dari jalan) - hanya jalan setapak 7. Jarak tanam tidak teratur
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 8. Lapangan kerja terbatas/ Pengangguran 9. Biaya produksi > pendapatan 10. Pemasaran hasil dari HKm sulit 11. Harga komoditi rendah 12. Pendapatan rendah - kemiskinan 13. Ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber penghasilan tinggi
Sosial & Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 14. Pencurian kayu terus berlangsung 15. Pendekatan pengelola kepada masyarakat kurang 16. Lunturnya nilai-nilai kegotong royongan 17. Pembinaan oleh pengelola kurang 18. Konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional 19. Kesadaran masyarakat terhadap kelompok rendah 20. Pengetahuan dan ketrampilan dalam usahatani "agroforestri" rendah 21. Kelompok sekedar nama - tidak aktif 22. Awiq-awiq belum ada/ada tapi tidak efektif 23. Partisipasi masyarakat dan aparat desa rendah dalam program-program pemerintah
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 24. Distorsi antara formulasi kebijakan dengan implementasi 25. Tujuan pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat 26. Kurang koordinasi antara Dinas dengan masyarakat 27. Kurang penyuluhan/petugas penyuluhan kurang memadai

Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat ketiga desa terhadap hutan cukup tinggi (lihat Tabel 1, masalah sosial no. 13). Data hasil survey memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat dari ketiga desa di sekitar kawasan (rata-rata 75 %) memiliki ketergantungan cukup besar terhadap hutan. Bentuk ketergantungan ini ditunjukkan oleh pemanfaatan hutan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, antara lain hutan sebagai sumber *kayu bakar*, *sumber pangan dan pendapatan* (dari penanaman tanaman semusim dan

tanaman tahunan masyarakat menghasilkan pangan seperti jagung, ubi kayu dan pisang), *sumber kayu bangunan* dan hutan sebagai *sumber air*. Dalam hal ketergantungan masyarakat terhadap hutan sebagai sumber air, hasil survey menunjukkan hampir 90 % masyarakat memanfaatkan air yang berasal dari kawasan hutan, baik untuk keperluan pengairan maupun untuk keperluan lain seperti air minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Persepsi masyarakat terhadap hutan

Masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap hutan. Hal ini ditunjukkan oleh respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap tiga "pertanyaan persepsi", yaitu tentang "kondisi hutan saat ini?", "bagaimana sebaiknya perilaku masyarakat terhadap hutan" dan "bagaimana sikap masyarakat jika ada pihak yang mengganggu hutan". Hal ini tampak dari pandangan bahwa hutan seharusnya dijaga, dikelola dan dimanfaatkan. Hasil survey dan workshop menegaskan bahwa tidak ada dari masyarakat yang berpandangan dan berharap untuk memiliki hutan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya "menjaga hutan" tidak lepas dari kenyataan dan kesadaran bahwa sebagian besar masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan.

Kekompakan masyarakat dalam menjaga hutan

Data hasil survey dan workshop menunjukkan tingginya tingkat kekompakan masyarakat dalam menjaga hutan. Hal ini tampak dari adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya "menjaga hutan", dan tindakan yang akan diambil jika ada pihak yang mengganggu hutan, yaitu dengan melarang atau melaporkan kepada pihak terkait. Bentuk lain dari adanya kekompakan masyarakat dalam menjaga hutan adalah adanya kegiatan gotong royong dalam mengelola dan memelihara hutan dan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan - khususnya melalui program hutan kemasyarakatan.

Persepsi terhadap agroforestri

Masyarakat di sekitar kawasan memiliki sikap dan tindakan yang positif (ada konsistensi sikap dan tindakan) terhadap pengembangan "sistem agroforestri" sebagai alternatif pengelolaan hutan. Konsistensi sikap dan tindakan dalam pengembangan sistem agroforestri ini terlihat dari fakta bahwa sesungguhnya masyarakat telah dengan sengaja mengembangkan tanaman pertanian dan kehutanan pada bidang lahan yang sama - pada kebun milik sendiri dan hutan di kawasan HKm. Pada lahan-lahan kebun milik masyarakat telah ditama sejak lama sejumlah

tanaman pangan seperti pisang, ubi kayu, jagung di sela-sela tanaman perkebunan seperti durian, manggis, rambutan, nangka, vanili dan lada. Pada lahan-lahan hutan kemasyarakatan juga telah dikembangkan dan ditanam campuran dari tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Walaupun persepsi terhadap agroforestri cukup positif, perilaku masyarakat masih dalam “trial and error” atau “mencoba” dengan menanam tanaman perkebunan yang menurut mereka cocok dengan keadaan lahan, dan tidak atas bimbingan teknis dari aparat terkait - misalnya dari petugas lapangan dinas kehutanan dan perkebunan. Hal ini juga dapat dimaklumi mengingat bahwa masyarakat mulai mengelola HKm dalam empat tahun terakhir ini (sejak tahun 1998).

Persepsi masyarakat terhadap peran yang seharusnya dimainkan oleh stakeholders

Masyarakat di sekitar kawasan hutan Batuk Liang Utara memiliki perhatian terhadap pengelolaan hutan. Selain menunjuk berbagai pihak untuk berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan, masyarakat juga menunjuk dirinya untuk mengelola dan melestarikan hutan. Pihak-pihak yang dianggap terkait dengan pengelolaan hutan antara lain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas dan swasta. Kepada pihak-pihak ini masyarakat berharap agar dapat memberikan kejelasan hak atas pengelolaan hutan, bimbingan teknis dan bantuan permodalan. Hanya dengan kejelasan atas hak pengelolaan dan dukungan teknis serta pemodalannya, masyarakat dapat melaksanakan perannya dalam ikut menjaga dan melestarikan hutan.

Aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Hutan di Lombok Tengah

Kelembagaan Petani:

Keberadaan kelompok dan proses terbentuknya

Pada ketiga desa yang diteliti di kabupaten Lombok tengah - Aik Berik, Stiling, dan Lantan ditemukan bahwa pada masing-masing desa telah ada kelembagaan, yaitu Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) masing-masing berjumlah 42 kelompok di Aik Berik, 27 kelompok di Stiling dan 60 kelompok di desa Lantan. Kelompok tani-kelompok tani tersebut terbentuk pada tahun 1998 sejalan dengan dimulainya program Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Dari perspektif proses pembentukannya, kelompok-kelompok pada lokasi penelitian terbentuk atas inisiatif masyarakat yang juga difasilitasi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Secara teoritis, kelompok yang dibentuk atas

inisiatif masyarakat seharusnya dapat hidup dan bertahan selama dirasakan keperluannya (Oakley, 1994: Rouse, 1994: Chamala, 1995). Hal ini dapat dimengerti karena proses pembentukan yang demikian akan melahirkan “rasa memiliki”, “komitmen” dan “tanggung jawab” terhadap kelompok. Sayangnya, teori ini ini tidak terbukti untuk kasus dalam penelitian ini. Beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan fenomena ini antara lain, masyarakat tidak mengerti tentang hakekat berkelompok dan atau kelompok dan anggotanya belum memiliki orientasi yang jelas “mau kemana dengan kelompok itu”.

Pada masing-masing lokasi, yaitu kawasan hutan di desa Aik Berik, Stiling dan Lantan kelompok-kelompok tersebut kemudian menggabungkan diri dalam forum atau wadah yang lebih luas yang disebut sebagai “Blok”. Blok inilah yang menghimpun kelompo-kelompok (yang beranggotakan sekitar sekitar 25 petani).

Selain kelompok tani hutan, di kawasan ini juga diidentifikasi kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan kawasan hutan, yaitu kelompok tani tanaman pangan, kelompok usaha bersama dan perkumpulan petani pemakai air (P3A).

Kegiatan dan peran kelompok

Data pada Tabel 2 (Lampiran) menunjukkan bahwa semua kelompok “tidak aktif” dan tidak memiliki kegiatan yang jelas. Kelompok hanya digunakan pada masa awal pelaksanaan HKM, yaitu sebagai media pendistribusian lahan dan bibit tanaman untuk keperluan HKM (durian dan gaharu).

Hasil wawancara mendalam dengan para koordinator kelompok menunjukkan beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kelompok tidak aktif, yaitu:

- Kurangnya pembinaan terhadap kelompok oleh petugas terkait seperti dari pondok pesantren dan dari dinas Kegutanan Lombok Tengah.
- Selain itu, petani anggota juga tidak memiliki orientasi yang jelas tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh kelompok.
- Tidak efektifnya awiq-awiq kelompok, juga menjadi alasan bagi rendahnya aktifitas atau peran kelompok. Telaahan terhadap awiq-awiq menunjukkan bahwa norma yang termuat dalam awiq-awiq tidak secara spesifik mengatur anggota kelompok tetapi mengatur kelompok dalam pelaksanaan HKM.
- Penyebaran anggota kelompok di kawasan rupanya menjadi alasan lain dari kurang efektifnya kelompok. Anggota kelompok hanya menyatu dalam hal domisili (yaitu pada masing-masing dusun) dan menyebar atau terpecah jauh di lahan dalam kawasan HKM.

Kelompok belum banyak berfungsi sebagai wadah yang memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan hutan untuk kepentingan pelestarian sumberdaya hutan, dan juga pemberdayaan ekonomi anggota.

Aset, bantuan dan pembinaan terhadap kelompok

Terbatasnya peran kelompok dalam memfasilitasi proses “belajar” tidak lepas dari beberapa faktor antara lain masih terbatasnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait, termasuk pengelola HKm (koperasi pondok pesantren Darussiddiqien) terhadap kelompok, kesadaran anggota atas kelompok rendah. Bantuan yang diterima kelompok selama ini hanya terbatas pada bantuan teknis (yaitu berupa bantuan bibit tanaman durian - ini pun hanya terjadi pada masa awal pelaksanaan HKm).

Aturan kelompok

Pada semua kelompok telah ada aturan yang menjadi dasar dan pedoman untuk berperilaku bagi anggota kelompok. Beberapa hal yang diatur dalam aturan (*awiq-awiq*) antara lain larangan untuk menebang pohon, dan sanksi bagi yang melanggarnya. Sayangnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pada hampir semua kelompok aturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Masalah dan harapan terhadap kelompok

Masalah mendasar yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berada di kawasan ini adalah bahwa kelompok tidak berfungsi. Kelompok hanya berfungsi pada masa awal pelaksanaan HKm. Pondok pesantren tidak menggunakan kelompok sebagai wadah untuk memasyarakatkan kegiatannya termasuk pada saat distribusi kartu anggota HKm (baru sebagian anggota yang bayar Rp.15.000 yang memiliki kartu anggota)¹.

Hasil proses belajar yang difasilitasi melalui penelitian ini menunjukkan bahwa semua stakeholders mengharapkan agar kelompok dapat menjadi wadah atau kelembagaan yang dapat membantu petani dalam hal teknis, pemasaran dan pengembangan ekonomi. Latihan-latihan tentang manajemen kelompok sangat diharapkan.

Kelembagaan Aparat

Penelitian ini mengidentifikasi lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan hutan, khususnya pada program Hutan

¹ Pondok pesantren menggunakan kelompok untuk menarik PAD (yang disetor ke Kas Daerah - “menurut pengurus pondok”), dan tidak jelas kemana - menurut masyarakat.

Kemasyarakatan di Lombok tengah. Dalam pembelajaran bersama yang difasilitasi melalui Workshop di tingkat kawasan dan kabupaten terungkap antara lain terbatasnya pembinaan dan pendekatan oleh pihak terkait, tidak ada koordinasi antar lembaga dan antar lembaga dengan masyarakat. Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pihak lain, dinas Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup juga berjalan sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Koperasi pondok pesantren yang menjadi pemegang hak kelola atas kawasan HKm.

Wawancara mendalam dengan masing-masing stakeholders dan hasil pembelajaran pada workshop menunjukkan beberapa alasan bagi terbatasnya kerjasama, koordinasi dan peran dari masing-masing lembaga dalam pengelolaan hutan. Alasan tersebut antara lain, terbatasnya jumlah dan kemampuan petugas lapangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terbatasnya dana untuk pembinaan dan pendampingan, tidak ada mekanisme kerjasama dan koordinasi yang jelas antara Dinas dan Pondok Pesantren. Di sisi lain ada hambatan psikologis antar Dinas di Tingkat Kabupaten untuk bekerjasama dan berkoordinasi karena kedudukan mereka yang berada pada satu level - secara khierarkis. Faktor-faktor ini konsisten dengan pandangan beberapa penulis tentang hambatan bagi terjalannya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam pembangunan, antara lain perlunya kesadaran dan tanggung jawab bersama, semangat bersama, dan kesediaan waktu serta sumber (Kramer, Bloom, dan Wimpfheimer, 1991: Plath, 1996).

Keterbatasan dalam kerjasama dan koordinasi ini ternyata telah menyebabkan rendahnya intensitas pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang mengelola HKm. Masyarakat atau kelompok menyatakan tidak adanya pembinaan dalam hal teknis pengelolaan hutan dan pengelolaan kelompok. Sebagai konsekuensinya adalah pengakuan masyarakat akan rendahnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan hutan dan kelompok (lihat Tabel 1).

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya kearah pengembangan kemampuan masyarakat, melalui pengembangan kelembagaan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat aparat. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk seharusnya ditumbuh kembangkan sehingga menjadi wadah yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan hutan secara lestari. Sementara di tingkat lembaga aparat, perlu difasilitasi terbentuknya forum kerjasama dan koordinasi lintas lembaga - antar stakeholders yang diharapkan mampu menjadi media konvergensi dan divergensi sumber-sumber yang diarahkan bagi pengelolaan hutan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan adanya masalah sosial dan kelembagaan pada masyarakat di sekitar kawasan hutan (“kelembagaan” sebagai “wadah” dan kelembagaan sebagai “aturan” atau “norma”). Dalam hal aspek sosial, teridentifikasi tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan, adanya masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, yang kemudian mendorong pada perilaku pencurian dan penebangan hutan. Masalah-masalah ini tampak lebih dominan mempengaruhi perilaku menyimpang pada masyarakat, walau sesungguhnya mereka sadar dan memiliki persepsi yang positif terhadap “keharusan untuk menjaga hutan.

Dalam perspektif kelembagaan sebagai kelompok, kelompok-kelompok tani hutan yang ada di kawasan Batukliang Utara - Lombok Tengah terbentuk sebagai bagian dari pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui program HKm, masyarakat petani sekitar hutan diminta untuk membentuk kelompok, yang pada awalnya digunakan sebagai media penyampaian informasi dan pemasyarakatan atau sosialisasi program HKm, dan media penyaluran bibit tanaman. Hasil survey dan workshop menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang ada di ketiga desa pengelola HKm tidak aktif dan bahkan “*kelompok hanya sekedar nama*” (mengutip pernyataan peserta workshop).

Saran

Atas dasar hasil kajian ini, maka disarankan agar kelompok-kelompok yang kini ada perlu untuk diberdayakan atau dikuatkan, sebagaimana yang menjadi harapan dalam “rumusan kebijakan”. Kelompok dapat diarahkan tidak saja sebagai wadah atau instrumen untuk melaksanakan program-program pemerintah, tetapi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan, kelompok harus dipandang sebagai wadah yang dimiliki oleh masyarakat yang mampu berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat (dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan) dan memfasilitasi proses belajar. Pada gilirannya kelompok-kelompok tersebut akan berperan nyata dalam pengelolaan hutan secara lestari, pemberdayaan ekonomi dan sosial dan budaya masyarakat. Diperlukan kegiatan-kegiatan untuk memfasilitasi proses belajar pada kelompok tentang esensi keberadaan kelompok, tujuan dan peran ideal kelompok

dalam kerangka pengelolaan hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Dalam kajian kelembagaan dari perspektif “aturan” atau “norma”, penelitian ini menunjukkan telah adanya sejumlah aturan pada ketiga lokasi penelitian, yang oleh masyarakat di sekitar kawasan disebut sebagai “awiq-awiq”. Sayangnya, hasil survey dan workshop menunjukkan bahwa aturan atau awiq-awiq tersebut belum berfungsi sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang sistimatis dan berkelanjutan agar aturan-aturan dapat dibangun melalui pendekatan yang partisipatif, yang pada gilirannya mendorong terciptanya aturan yang berfungsi efektif dalam mengatur perilaku anggota masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram* yang berjudul “Implementation of Agroforestry and Integrated Farming System through Community Participation in the Forest Boundary and Steep Dry Land Area”. Ucapan terima kasih disampaikan kepada (1) *Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme - MFP) – Department for International Development (DFID) – United Kingdom (UK)*, dan (2) Ir. Hasbi Berliani (selaku Fasilitator Daerah MFP-DFID), yang telah bekerjasama dengan P3P Unram dan mendukung pendanaan dan pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Lombok Tengah, 2003. Laporan Tahunan.
- Kramer, M. Bloom, M. and Wimpfheimer, R. 1990. "Inter-agency Collaboration: Some Working Principles" *Administration in Social Work*, 14 (4): 89 - 102.
- Muktasam, A. 2000. *A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes*. The University of Queensland (Ph.D Thesis).
- Muktasam, A., Rosiady, H.S., Gatot, D.H., Markum, Bambang, H.K., dan Bambang, D.K., 2003. Implementation of Agroforestry and Integrated Farming System through Community Participation in the Forest Boundary and Steep Dry Land Area (Research Center for Rural Development – Mataram University - Unpublished Research Report).

- Oakley, P. 1994. "Bottom-up Versus Top-Down: Extension at The Crossroads". *Ceres* **145** (January - February): 16 - 20.
- Plath, D. 1996. "Inter-agency Collaboration at the Local Level", in *Windows on the World* (28th Annual International Conference of the Community Development Society - 21 - 24 July). Melbourne: World Congress Centre.
- Rouse, J. 1994. "Experiment with Democracy". *Ceres* **145** (January - February): 21 - 25.

LAMPIRAN

Tabel 2. Keadaan Umum Kelompok Tani Hutan di Tiga Desa Penelitian di Lombok Tengah

Kelompok Tani	Aik Berik	Setiling	Lantan
1. Jumlah kelompok	42	27	60
2. Jumlah anggota	1042 petani (rata-rata 25 petani per kelompok)	675 petani	600 petani (rata-rata)
3. Tahun terbentuk	1998	1998	1998
4. Luas areal	509 ha dengan rata-rata 0,5 ha per petani	337.5 ha	300 ha
5. Proses pembentukan	Masyarakat bersama petugas HKM	Diawali dengan adanya sosialisasi HKM tahun 1997, dan kelompok pun dibentuk oleh masyarakat bersama petugas HKM	Kelompok dibentuk oleh masyarakat bersama petugas HKM (dari pondok pesantren)
6. Struktur kelompok	Pada masing-masing kelompok ada ketua, sekertaris dan bendahara, dan antar kelompok ada koordinator dan 5 sub-koordinator (kepala dusun atau tokoh masyarakat)	Pada masing-masing kelompok ada ketua, sekertaris dan bendahara, dan antar kelompok ada koordinator dan 7 sub-koordinator	Kelompok terdiri atas ketua, sekertaris dan bendahara. Antar kelompok ada koordinator dan 8 sub-koordinator
7. Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8. Aset kelompok	Balai pertemuan	Pondok pertemuan	Balai pertemuan
9. Pembinaan	Pembinaan terbatas (hanya pada awal pembentukan, tahun 1998),	Pembinaan terbatas (hanya pada awal pembentukan, tahun 1998).	Pembinaan terbatas (hanya pada awal pembentukan, tahun 1998).
10. Bantuan terhadap kelompok	bibit dari kehutanan (Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanaman - BRLKT) berupa 10.000 pohon durian & 1000 pohon gaharu dari Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).	Bibit durian	Bibit durian

11. Peran kelompok	Terbatas yaitu hanya pada saat awal kegiatan	Terbatas yaitu hanya pada saat awal kegiatan	Terbatas yaitu hanya pada saat awal kegiatan (memudahkan pembagian kaplingan lahan, gotong royong pembersihan lahan & pembuatan jalan).
12. Keberadaan aturan atau awiq-awiq	Ada awiq-awiq dan dibuat bersama antara kelompok dengan pondok pesantren, namun belum diterapkan secara efektif.	Ada awiq-awiq dan dibuat bersama antara kelompok dengan pondok pesantren	Ada awiq-awiq dan dibuat bersama antara kelompok dengan pondok pesantren
13. Masalah kelompok	Kurang berfungsi. Kelompok hanya berfungsi pada masa awal pelaksanaan HKm. Pondok pesantren tidak menggunakan kelompok sebagai wadah untuk memasyarakatkan kegiatannya termasuk pada saat distribusi kartu anggota HKM (baru sebagian anggota yang bayar Rp.15.000 yang memiliki kartu anggota) ² .	Kurang berfungsi. Kelompok hanya berfungsi dalam distribusi lahan dan bibit pada masa awal HKm	Kurang berfungsi. Kelompok hanya berfungsi dalam distribusi lahan dan bibit pada masa awal HKm
14. Keberadaan kelompok lain dan masalahnya	Ada kelompok lain seperti Kelompok tani (5 aktif dan 8 tidak aktif), dan masing-masing sebuah kelompok wanita tani, P3A, dan kelompok usaha bersama (KUB, baru terbentuk).	Ada kelompok lain seperti P3A, kelompok tani tanaman pangan di luar kawasan hutan, koperasi desa	Ada kelompok lain seperti P3A, kelompok tani tanaman pangan di luar kawasan hutan

² Pondok pesantren menggunakan kelompok untuk menarik PAD (yang disetor ke Kas Daerah - "menurut pengurus pondok"), dan tidak jelas kemana - menurut masyarakat.

15. Harapan ke depan	Kelompok dapat menjadi wadah atau kelembagaan yang dapat membantu petani dalam hal teknis, pemasaran dan pengembangan ekonomi	Kelompok dapat menjadi wadah atau kelembagaan yang dapat membantu petani dalam hal teknis, pemasaran dan pengembangan ekonomi	Kelompok dapat menjadi wadah atau kelembagaan yang dapat membantu petani dalam hal teknis, pemasaran dan pengembangan ekonomi
----------------------	---	---	---
